

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA
DI DESA SUNGAI TURAK KECAMATAN AMUNTAI UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu Syarat untuk memenuhi Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH :

MUHAMMAD HIDAYAT

NPM : 2022363

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : MUHAMMAD HIDAYAT

NPM : 2022363

Program Studi : S1 Administrasi Publik

Judul Skripsi : **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 74
TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA DI DESA
SUNGAI TURAK KECAMATAN AMUNTAI UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat
menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan
Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi (STIA) Amuntai

Amuntai, April 2026

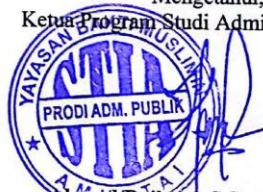
Pembimbing 1

Pembimbing 2


Drs. H. Arpandi, M.A.P.
NUPTK. 8553741642130083


Mahdalina, S.Pd.I, M.Pd.
NUPTK. 0433765666300192

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik


Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang yang mengikuti jejak dan langkah beliau hingga akhir zaman, syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara”**. Proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengajukan skripsi pada Program Studi Administrasi Publik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, saya banyak mendapatkan pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan proposal skripsi ini selesai. Dengan segala bantuannya, semoga Allah SWT. membalas semua kebaikannya, semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan masyarakat khususnya mahasiswa.

Amuntai, April 2026

Penulis

Muhammad Hidayat

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Teoritis	9
C. Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Tipe Penelitian	25
D. Data dan Sumber Data	26
E. Desain Operasional Penelitian	27
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data	30
H. Uji Kredibilitas Data	31
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Informan	27
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	24
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang hingga saat ini masih menjadi perhatian di berbagai daerah di Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas masyarakat, jumlah sampah yang dihasilkan juga semakin meningkat. Sampah adalah bahan buangan yang dihasilkan dari seluruh aktivitas manusia. Yang dapat menghasilkan sampah adalah kegiatan rumah tangga, kegiatan perkantoran, rumah makan, hotel, penginapan, industri, bangunan, kendaraan, dan lain-lain.

Apabila sampah tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, serta gangguan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Di tingkat nasional, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengurangi dan menangani sampah melalui kegiatan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.

Permasalahan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi masalah klasik yang belum dapat dikelola sepenuhnya sejak dari sumbernya yaitu dari kegiatan rumah tangga masyarakat atau sampah rumah tangga. Padahal pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat, jumlah sampah yang dihasilkan juga semakin bertambah. Sampah harian yang berakhir di Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Tebing Liring, Desa Tebing Liring, Kecamatan Amuntai Utara, mencapai 95 ton per hari. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan berbagai kebijakan guna memperbaiki sistem pengelolaan sampah agar lebih terarah dan optimal.

Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 yang diterbitkan Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Bupati memaparkan kebijakan dan rencana pengelolaan sampah perumahan dan jenis sampah sejenisnya. Pengelolaan sampah, menurut kebijakan tersebut, dilakukan secara metodelis, menyeluruh, dan berkelanjutan, mencakup penanganan dan pengurangan sampah, yang meliputi daur ulang, penggunaan kembali, dan upaya untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan. Meskipun kebijakan tersebut telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala di lapangan, terutama pada tingkat desa.

Pada Desa Sungai Turak, pengelolaan sampah sudah mulai dilakukan melalui kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah oleh petugas yang telah ditunjuk. Masyarakat juga telah mengetahui jadwal pengangkutan sampah yang dilakukan setiap hari Kamis. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya pengelolaan sampah masih belum berjalan dengan baik karena masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi baik dari sisi pemerintah desa, petugas, maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, peneliti menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan sampah di Desa Sungai Turak, yaitu:

1. Sosialisasi pengelolaan sampah di Desa Sungai Turak masih kurang maksimal sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat belum jelas, terutama terkait tujuan, tata cara, dan peran masing-masing dalam pengelolaan sampah. Kondisi ini membuat masyarakat belum sepenuhnya memahami kebijakan tersebut, sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara optimal.
2. Kurangnya sarana dan prasarana, seperti tempat sampah, serta jumlah tenaga pelaksana yang belum memadai memengaruhi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah dan mengakibatkan penumpukan sampah di beberapa titik, sehingga menimbulkan bau tidak sedap, dan berpotensi mencemari lingkungan. Selain itu, petugas juga masih memerlukan peningkatan informasi terkait teknis pengelolaan sampah yang baik dan benar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan di lapangan masih perlu ditingkatkan.
3. Keterlibatan perangkat desa dalam pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan, yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan, seperti pengangkutan sampah yang belum berjalan secara rutin. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan yang ada masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal kerja sama antar pelaksana. Selain itu, kejelasan terkait dorongan dan sanksi juga perlu ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan tugas yang lebih optimal.

4. Di Desa Sungai Turak, masyarakat sudah mengetahui bahwa jadwal pengangkutan sampah dilakukan setiap hari Kamis. Namun, karena pengangkutan hanya dilakukan sekali dalam seminggu, sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya mengalami penumpukan sebelum hari pengangkutan. Selain itu, standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pengelolaan sampah masih belum jelas, yang terlihat dari belum optimalnya pengaturan pengumpulan serta pengawasan pada saat pengangkutan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara”**.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Sungai Turak, khususnya dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.

Dalam penelitian ini, yang menjadi perhatian utama adalah peran pemerintah desa, petugas pelaksana, serta partisipasi masyarakat dalam

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Ketiga unsur ini memiliki keterkaitan yang erat dalam menentukan keberhasilan pengelolaan sampah di tingkat desa. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana, kejelasan komunikasi kebijakan, komitmen pelaksana, serta koordinasi antar pihak menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah secara optimal.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam upaya perbaikan sistem pengelolaan sampah, sehingga mampu mengurangi permasalahan lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menciptakan lingkungan desa yang bersih dan sehat.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Desa Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan, maka fokus penelitian ini fokus pada teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III dalam (Leo Agustino, 2022:154-159):

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang administrasi

publik terkait implementasi kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya instansi terkait, dalam meningkatkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Sungai Turak dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pengelolaan sampah yang lebih baik.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Agung Satria Mandala (2022) yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)”. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah sudah berjalan cukup baik dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengendalikan permasalahan sampah. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian Agung Satria Mandala lebih menekankan pada implementasi peraturan daerah dari perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada aspek implementasi kebijakan dan efektivitas pelaksanaan di lokasi penelitian yang berbeda. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah.
2. Muhammad Syarif (2022) yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Babadan Kabupaten Bantul)”. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan tidak adanya batas maksimal pembuangan sampah per rumah tangga, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta tidak adanya kejelasan jadwal pengangkutan sampah. Selain itu, kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang overload juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian. Penelitian Muhammad Syarif menggunakan pendekatan hukum lingkungan dan masalah mursalah, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada implementasi kebijakan dari perspektif administrasi publik. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

Anderson dalam (Budi Winarno, 2014:19) mengungkapkan bahwa istilah kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Menurut Jones merumuskan kebijakan sebagai suatu *'behavioral consistency and repetitiveness' associated with efforts in and through government to resolve public problems*" yaitu perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis yang nanti dalam bagian lain

akan dibicarakan secara khusus dalam hubungannya dengan sifat dari kebijakan.

Menurut Thomas R. Dye dalam (Budi Winarno, 2014:20) definisi kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Definisi ini dianggap tepat, namun batasan ini tidak cukup memberi pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.

Tresiana (2017:6) sebagai suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas Parker mengkonsepsikan kebijakan publik dalam Novita tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan kritis.

Menurut Sahya Anggara (2014:36) tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan.

Dalam Faried Ali (2017:9) suatu kebijakan dapat disebut sebagai kebijakan publik jika memiliki empat unsur, yaitu:

- a. Adanya pernyataan kehendak. Berarti ada keinginan atau sejumlah kemauan untuk melakukan sesuatu atau tidak.
- b. Pernyataan didasarkan pada otoritas, berarti ada kewenangan yang dimiliki atau melekat pada diri seseorang pemegang atau pemilik kewenangan dan atau pada kesatuan sistem seperti lembaga atau organisasi, terlepas dari mana kewenangan diperoleh.

- c. Adanya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan jika perlu melakukan pemaksaan kehendak. Bahwa untuk mencapai kehendak yang diinginkan oleh otoritas diperlukan kegiatan pengaturan dalam artian yang seluas-luasnya.
- d. Adanya tujuan yang dikehendaki. Mengandung arti yang luas, tujuan dalam konteks ruang dan waktu capaian, tujuan dalam konteks situasi dan keadaan seperti upaya peredaman konflik atau penciptaan kesepakatan dalam kehidupan kebersamaan dengan mempertimbangkan peran dan status melakukan sesuatu.

Dari beberapa pendapat di atas penulis dapat berpendapat bahwa kebijakan publik adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk memecahkan suatu permasalahan kepentingan orang banyak dalam mencapai tujuan tertentu.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Dalam tahap kebijakan publik, implementasi kebijakan sering dianggap hanya sebagai pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, terkadang tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi kenyataannya, implementasi dalam tahap kebijakan publik ini menjadi begitu penting karena suatu kebijakan dapat tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Grindle dalam (Novita Tresiana, 2017:46) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses Implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Menurut Deddy Mulyadi (2016:56) Implementasi kebijakan merupakan tahap yang strategis dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Jan Merse dalam (Arifin Tahir, 2015:93) melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan yaitu: a) Informasi, b) isi kebijakan, c) dukungan masyarakat (fisik dan non fisik) dan d) pembagian potensi.

a. Tahap Implementasi

Menurut Rahayu Kusuma Dewi (2016:159) tahap Implementasi Kebijakan, yaitu:

- 1) Implementasi strategi (pra implementasi)
- 2) Pengeorganisasian (organizing)
- 3) Penggerakan dan kepemimpinan
- 4) Pengendalian

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Beberapa faktor eksternal yang mempersulit Implementasi suatu kebijakan menurut Deddy Mulyadi (2016:62) sebagai berikut:

- 1) Kondisi fisik, seperti terjadinya perubahan musim atau bencana alam. Dalam banyak hal, kegagalan implementasi kebijakan sebagai akibat dari faktor-faktor alam ini sering dianggap bukan sebagai kegagalan, sekalipun dalam hal-hal tertentu sebenarnya dapat diantisipasi untuk mencegah atau mengurangi risiko yang terjadi.

- 2) Faktor politik. Terjadinya perubahan politik yang mengakibatkan pergantian pemerintah dapat mengubah orientasi atau pendekatan dalam implementasi, atau bahkan dapat menimbulkan perubahan terhadap seluruh kebijakan yang telah dibuat.
- 3) Tabiat (Attitude) dari sekelompok orang yang cenderung tidak sabar menunggu berlangsung kebijaksanaan dengan sewajarnya, dan memaksa melakukan perubahan. Akibatnya terjadi perubahan kebijakan sebelum kebijakan itu dilaksanakan.
- 4) Terjadinya penundaan karena kelambatan atau kekurangan faktor input. Keadaan ini terjadi karena faktor-faktor pendukung yang diharapkan tidak tersedia pada waktu yang dibutuhkan, atau mungkin karena salah satu faktor dalam kombinasi faktor-faktor yang tidak diharapkan tidak cukup.
- 5) Kelemahan salah satu langkah dalam rangkaian beberapa langkah implementasi.
- 6) Kelemahan pada kebijaksanaan itu sendiri. Kelemahan ini dapat terjadi karena teori yang melatarbelakangi kebijakan atau asumsi yang dipakai dalam perumusan kebijakan tidak tepat.

3. Teori Implementasi Kebijakan Publik

a. Model Rippley dan Franklin

Ripley dan Franklin dalam Arifin Tahir (2015:95-96) mengemukakan bahwa kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada tiga perspektif, yaitu:

- 1) Perspektif kepatuhan birokrasi yang lebih rendah terhadap birokrasi di atasnya,
- 2) Perspektif kelancaran rutinitas dan tiadanya masalah,
- 3) Perspektif pelaksanaan yang mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

Implementasi kebijakan menurut Rippley dan Franklin lebih menegaskan bahwa setiap produk kebijakan publik yang siap diimplementasikan akan berhasil jika memperhatikan dan mensinergikan tiga faktor utama, yakni:

- 1) Tingkat kepatuhan birokrasi. Artinya setiap aparatur dalam birokrasi atau implementator kebijakan publik dituntut memiliki sikap dan mentality yang mewujud pada tindakan yang patuh dan taat asas dalam melaksanakan setiap kebijakan.
- 2) Kelancaran rutinitas dan tiada masalah. Dalam hal ini para implementor kebijakan publik sedapat mungkin mengeliminir setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan publik. Setiap implementor menjadi problem solver bukan malah sebaliknya menjadi pemicu permasalahan.
- 3) Kinerja. Setiap pelaksanaan kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi dari kebijakan itu sendiri. Efektifnya proses implementasi kebijakan tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektifitas dan optimalisasi kinerja kebijakan pun ditentukan oleh kinerja individu dan para implementor kebijakan publik itu sendiri.

b. Model Warwic

Menurut Warwic dalam Arifin Tahir (2015:93-94) mengatakan bahwa: Dalam Implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Kemampuan Organisasi,
- 2) Informasi,
- 3) Dukungan, dan
- 4) Pembagian potensi.

Selanjutnya keempat masing-masing faktor di atas diuraikan sebagai berikut;

- 1) Kemampuan organisasi; implementasi dalam tahapan ini diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas apa yang seharusnya dilakukan. Kemampuan organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yaitu:
 - a) Kemampuan teknis,
 - b) Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar unsur yang terkait,
 - c) Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan "SOPs" (*Standard Operating Procedures*), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.

- 2) Informasi; faktor informasi sangat pula memegang peran penting, karena kurangnya informasi yang dimiliki dapat mempengaruhi kebijakan itu sendiri.
- 3) Dukungan; kurang kesediaan objek-objek kebijakan "terikat" kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.
- 4) Pembagian potensi, pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

c. Model Jan Merse

Model implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Jan Merse dalam Arifin Tahir (2015:93), menegaskan bahwa:

"Model Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 1) informasi, 2) isi Kebijakan, 3) dukungan Masyarakat (fisik dan non fisik), dan 4) pembagian potensi. Khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program".

Penegasan di atas membuktikan bahwa karena pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap implementasi kebijakan dalam program pembangunan, maka setiap implementasi program tetap membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai stakeholder.

d. Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif top-down dikembangkan oleh George C. Edward III. Dalam pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

(i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III adalah komunikasi. Implementasi akan efektif jika para pelaksana memahami apa yang harus dilakukan. Keberhasilan komunikasi dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu:

- a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi).
- b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu).
- c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a) Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.
- b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d) Fasilitas; implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang

untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan disposisi. Disposisi atau sikap. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:

- a) Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
- b) Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implemenatasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya.
- c) Insentif; Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implelementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- a) Membuat Standar Operating Prosedures (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatanannya pada setiap harinya (*days-to-days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b) Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung-jawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan masing-masing.

Berdasarkan berbagai model implementasi kebijakan, penelitian ini menggunakan model implementasi George C. Edward III untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018

tentang pengelolaan sampah di Desa Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pemilihan model implementasi kebijakan George C. Edward III didasarkan pada empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini relevan untuk menganalisis pengelolaan sampah karena berkaitan dengan kejelasan informasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan efektivitas birokrasi.

4. Strategi

Menurut Arman Maulana (2023:7) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *Strategos* atau *strategus* dengan kata jamak strategi. Menurut Ismail Solihin dalam (Arman Maulana, 2023:7) Strategi tidak didefinisikan hanya semata-mata sebagai cara untuk mencapai tujuan karena strategi dalam konsep management strategi mencakup juga penetapan berbagai tujuan itu sendiri melalui berbagai keputusan strategi yang diharapkan akan menjamin terpeliharanya keunggulan kompetitif perusahaan.

Gaffar dalam (Fory A. Naway, 2016:5) bahwa strategi adalah rencana yang mengandung cara komprehensif dan integrative yang dapat dijadikan pegangan untuk bekerja, berjuang dan berbuat guna memenangkan kompetensi.

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi di artikan sebagai suatu proses untuk menentukan arah yang dijalani oleh suatu organisasi agar tujuannya tercapai.

5. Pengelolaan

Menurut Fory A. Naway (2016:9) pengelolaan adalah proses penataan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen tentu gunanya sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati.

Kemudian Suprianto dan Muhsin dalam (Fory A. Naway, 2016:9) mengatakan bahwa “pengelolaan adalah keterampilan untuk meramu komponen dan unsur-unsur yang terlibat dalam suatu sistem untuk mencapai hasil atau tujuan yang direncanakan”.

6. Sampah

a. Pengertian Sampah

Menurut Chusnul Chotimah (2020:11-12) sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Sementara didalam Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai dapat atau tidak terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah berasal dari beberapa tempat, yakni:

- a. Sampah dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal disuatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya.

- b. Sampah dari tempat-tempat umum dan termasuk perdagangan tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran busuk, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.

Menurut Yudiyanto, dkk. (2019:9) pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, pengurangan sampah dilakukan dengan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.

Berbagai macam sampah yang telah disebutkan di atas hanyalah sebagian kecil saja dari sumber-sumber sampah yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah. Terutama penumpukan sampah yang terjadi di tempat-tempat umum seperti di pasar-pasar.

b. Sumber dan Jenis Sampah

Menurut Dwi Indrawati (2021:5-7) payung hukum untuk sampah di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan cara mengurangi sampah melalui kegiatan 3R (reduce, reuse dan recycle) dan menangani residu dari kegiatan 3R tersebut. Sampah yang diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 dibagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

- a. Sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- c. Sampah spesifik, yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

Berdasarkan sumbernya, sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dari perkotaan yang dikelola oleh pemerintah kota/kabupaten di Indonesia bisa dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Sampah kegiatan rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, meliputi rumah tinggal yang dihuni sebuah keluarga atau sekelompok rumah yang berada dalam suatu kawasan pemukiman maupun unit rumah tinggal yang berupa rumah susun. Jenis sampah yang dihasilkan dari sumber tersebut adalah sisa makanan yang dominan, plastik, kertas, karton, kain, kayu, kaca, daun, logam dan terkadang sampah yang berukuran besar yaitu dahan pohon. Selain itu, sumber tersebut menghasilkan sampah B3 (bahan berbahaya dan beracun) seperti baterai, lampu TL, sisa obat-obatan, dan lain-lain.
- b. Sampah kegiatan komersial berasal dari pertokoan, pusat perdagangan, pasar, hotel dan sejenisnya. Umumnya sampah yang dihasilkan berupa kertas, plastik, kayu, kaca, logam, dan sisa makanan.
- c. Sampah pasar tradisional yang menghasilkan sisa sayur, buah dan makanan yang mudah membusuk.
- d. Sampah kegiatan perkantoran. Sumber sampahnya meliputi perkantoran, sekolah, rumah sakit, dan lembaga permasyarakatan. Menghasilkan sampah dari kegiatan rutin perkantoran yaitu kertas dan sisa makanan.
- e. Sampah hotel dan restoran. Sampah yang dihasilkan berupa sisa sayuran mentah, daging atau ikan, serta sisa makanan matang lainnya.
- f. Sampah industri dan rumah sakit. Menghasilkan sampah sejenis sampah domestik, seperti sisa makanan, kertas, dan plastik.
- g. Sampah penyapuan jalan dan taman, seperti jalan kota, ruang terbuka hijau, taman, tempat parkir, tempat rekreasi, saluran drainase kota, dan fasilitas umum lainnya. Sampah yang dihasilkan adalah berupa daun atau dahan pohon, pasir, sampah umum dari pejalan kaki, pembungkus plastik, kertas, dan karton.

7. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 menjelaskan bahwa sampah rumah tangga dan sejenisnya merupakan sisa kegiatan manusia dan/atau proses alam berbentuk padat yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan jika tidak dikelola dengan baik. Sampah yang tidak tertangani dapat menyebabkan pencemaran, menurunkan kualitas hidup, dan mengganggu ekosistem.

Peraturan ini bertujuan meningkatkan pengelolaan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, seperti pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali. Pengelolaan dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

8. Desa Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Utara

Desa Sungai Turak merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis, Desa Sungai Turak berada pada kawasan yang didominasi oleh lingkungan perairan dan lahan rawa, sehingga aktivitas masyarakatnya tidak terlepas dari kondisi alam tersebut. Sebagian besar masyarakat di desa ini bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan kegiatan usaha kecil lainnya. Kondisi ini turut mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga.

Sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Amuntai Utara, Desa Sungai Turak memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Oleh karena itu, Desa Sungai Turak menjadi salah satu lokasi yang relevan untuk penelitian bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan di tingkat desa serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungan mereka.

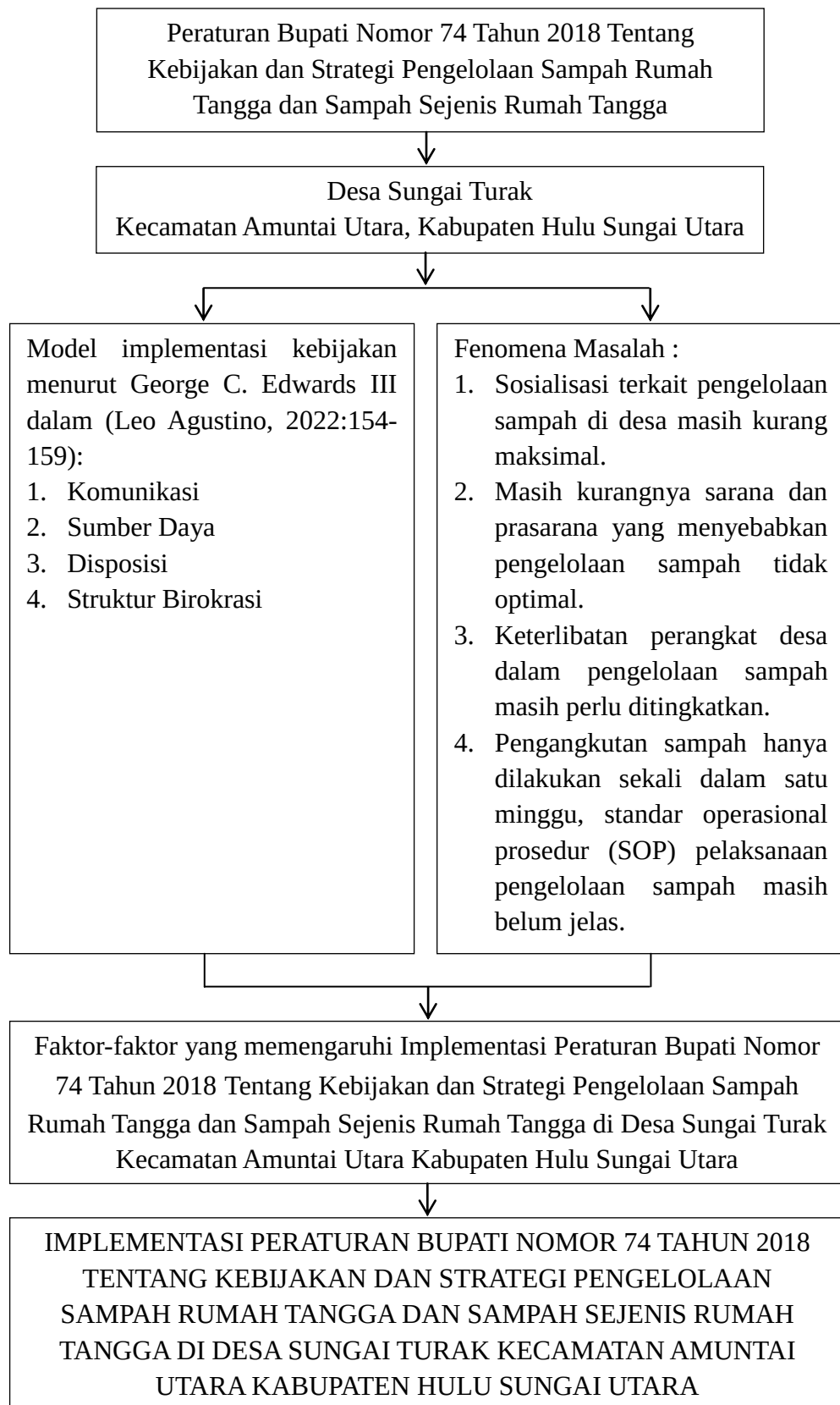
C. Kerangka Pemikiran

Menurut Anita Sari, dkk. (2023;71) kerangka berpikir dapat berupa kerangka teori. Kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori itu dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Penelitian mengenai implementasi peraturan ini di Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III dalam (Leo Agustino, 2022:154-159), yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan penulis sebagai objek penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Turak yang terletak di Jl. Majakalait, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan 71471.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sesuai dengan cara mengamati, menyelidiki untuk mendapatkan, mengumpulkan data dan informasi tentang objek penelitian. Penelitian kualitatif menurut Gunawan (2015:80) “menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah”.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih fenomena yang dihadapi.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menunjukkan apa yang terjadi sebenarnya.

Penelitian deskriptif menurut Anggara (2015:21) menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam, yang artinya penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkapkan segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitiannya

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Pada umumnya, jenis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer disebut juga data asli atau baru. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset baik secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian, atau kegiatan dan hasil pengujian. Untuk penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder juga digunakan sebagai data pendukung guna memperkuat data primer. Sumber data sekunder di penelitian ini bersumber dari dokumentasi berupa foto pengamatan, dan dokumen atau arsip yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang relevan dengan kajian penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data adalah data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik penempatan informan yang peneliti gunakan adalah teknik penempatan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu *purposive* (bertujuan).

Purposive (bertujuan) adalah teknik pengambilan sampel yang berfokus pada pemilihan partisipan yang memiliki karakteristik terkait dengan studi penelitian. Menurut Sugiyono (2017:85) “*Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah orang yang meliputi:

Tabel 3. 1
Data Informan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Desa Sungai Turak	1 Orang
2.	Aparat Desa Sungai Turak	1 Orang
3.	Petugas pengangkut sampah desa	1 Orang
4.	Ketua RT	5 Orang
5.	Masyarakat	4 Orang
Jumlah		12 Orang

Sumber: Dibuat oleh Peneliti (2026)

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mempermudah pengumpulan data agar hasilnya lebih sistematis dan mudah diolah. Dalam penelitian ini digunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III (Leo Agustino, 2022:154–159) yang meliputi:

1. Komunikasi

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan

implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan suatu kebijakan agar dapat berjalan secara efektif. Dalam model implementasi kebijakan George C. Edward III, sumber daya meliputi beberapa unsur penting yaitu staf atau sumber daya manusia, informasi, wewenang, serta fasilitas atau sarana dan prasarana.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap, komitmen, atau kecenderungan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Disposisi berkaitan dengan kesediaan, kejujuran, dan tanggung jawab para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah susunan organisasi yang mengatur struktur birokrasi yang baik akan membantu pelaksanaan kebijakan menjadi lebih terarah dan terkoordinasi. George C. Edward III menjelaskan bahwa terdapat dua hal penting dalam struktur birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian tugas atau fragmentasi organisasi.

Tabel 3. 2

Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan model Implementasi kebijakan George C. Edward III dalam (Leo Agustino, 2022:154-159):	Komunikasi	a. Transmisi b. Kejelasan c. Konsistensi
	Sumber Daya	a. Staf (Sikap pelaksana) b. Informasi c. Wewenang d. Fasilitas
	Disposisi	a. Efek Disposisi b. Melakukan Pengaturan Birokrasi c. Insentif
	Struktur Birokrasi	a. Membuat SOP b. Melaksanakan fragmentasi

Sumber: Dibuat oleh Peneliti (2026)

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara kualitatif adalah dengan cara menelusuri dokumen yang ada serta berkaitan dengan fokus saat melakukan sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data berupa langkah yang utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memenuhi standar data yang diterapkan. Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat setiap informasi sesuai dengan kenyataan yang dialami selama penelitian berlangsung. Pengalaman peneliti tersebut dapat terjadi berdasarkan melihat, mendengar dan merasakan yang kemudian dilaporkan seobjektif mungkin. Nasution dalam (Sugiyono, 2018:226) ‘menyatakan bahwa, Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi’.

2. Wawancara

Wawancara yang peneliti maksud disini adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab atau memberikan pertanyaan kepada responden secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dan segala pertanyaan difokuskan

permasalahan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data guna kelengkapan data- data yang diperoleh sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti melakukan pengumpulan data yang dapat diperoleh melalui sumber-sumber data yang dianggap relevan, baik berupa rekaman baik melalui makalah, buku-buku, surat- surat, maupun sumber informasi lain seperti arsip-arsip, dalil atau hukum- hukum, hasil penelitian dan lain sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:207) menyatakan bahwa aktivitas dalam model analisis data kualitatif mencakup 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

1. Reduksi Data

Berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dalam reduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.

2. Penyajian Data

Berarti sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposal.

Semua data yang telah didapatkan selanjutnya akan diolah dan diuraikan dalam yang sifatnya menggambarkan apa adanya mengenai data lapangan dalam bentuk uraian kalimat. Sesudah itu data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah membahas dan menilai kembali data yang sudah disajikan, agar memudahkan dalam menarik kesimpulan. Kesimpulan ditarik secara induktif, yaitu mengambil kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta yang di temukan di lapangan.

H. Uji Kredibilitas Data

Uji Kredibilitas data bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data, sehingga penafsiran data yang ditemukan oleh peneliti disepakati oleh pemberi informasi maka penelitian tersebut dapat dipercaya.

Menurut Sugiyono (2018:270) uji kredibitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data. penelitian ini, difokuskan pada pengujian terhadap data mengenai permasalahan yang telah diperoleh itu setelah dicek kembali kelapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali

kelengkapan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

4. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

6. Mengadakan *membercheck*

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh para pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila yang ditemukan peneliti berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus mengubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (2018). *Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga*. Amuntai: Pemerintah kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Anonim. (2022). *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi*. Amuntai: Program Studi Administrasi Publik.
- Adawiyah, M. (2024). *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Sungai Karias dan Tambalangan)*. Kebijakan Publik.
- Agustino, Leo. 2022. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Faried et al. 2017. *Studi Analisis Kebijakan Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Chotimah, C. (2020). *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif*. (D. M. Fauzi, Penyunt.) Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indrawati, D. (2021). *Pengelolaan Sampah, Teori dan Prinsip Perencanaan*. (T. Senyum, Penyunt.) Surabaya: CV. Pustaka MediaGuru.
- Kusuma Dewi, Rahayu. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Mandala, A. S. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)*.
- Maulana, A. (2023). *Manajemen Strategi*. Bandung: Azka.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Naway, F. A. (2016). *Strategi Pengelolaan Pembelajaran*. (D. Yusuf, Penyunt.) Gorontalo: Ideas Publishing.
- Rosmayanti, A. M. (2023). *Manajemen Strategi*. (A. Maulana, Penyunt.) Bandung: Yayasan Azka Hafidz Maulana.

- Roziaty, E. (2023). *Implementasi Pengolahan Sampah Anorganik*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sari, A. (2023). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. (Y. Prayitno, Penyunt.) Jayapura: CV. Angkasa Pelangi.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Syarif, M. (2022). *Implementasi Perraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Babadan Kabupaten Bantul)*. Yogyakarta: Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tresiana, Novita & Noverman Dudji. 2017. *Kebijakan Publik Teori dan Praktek Model-Model Pengelolaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: PT Buku Seru.
- Yudiyanto. (2019). *Pengelolaan Sampah Pengabdian Pendampingan di Kota Metro*. (R. Ummah, Ed.) Metro: Sai Wawai.